

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM
MENGATASI KETIMPANGAN SOSIAL
DI DESA KOTO TUO KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial
Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi*



Oleh:

NAMA: LARA MARDIANA ROSA

NPM : 210411004

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2025**

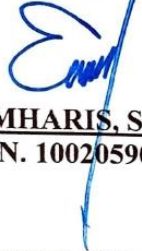
PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 12
Bulan : Juni
Tahun : 2025

Tim Penguji

KETUA



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

SEKRETARIS



SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si
NIDN. 1021117906

1. ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si

(Pembimbing I)



2. DESRIADI, S.Sos., M.Si

(Anggota Penguji I)



3. SARJAN M, S.Sos., M.Si

(Anggota Penguji II)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM
MENGATASI KETIMPANGAN SOSIAL DI DESA KOTO TUO
KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI
NAMA : LARA MARDIANA ROSA
NPM : 210411004
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

PEMBIMBING II



SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si
NIDN. 1021117906

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN HASIL KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lara Mardiana Rosa
NPM : 210411004
Fakultas : Ilmu Sosial
Program Studi : Administrasi Negara
Universitas : Islam Kuantan Singingi
Alamat : Desa Koto Tuo Kecamatan Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tulisan yang saya buat atau karya ilmiah yang saya hasilkan dengan judul **Analisis Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial Di Desa Koto Tuo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi** merupakan hasil karya saya sendiri tidak melakukan kegiatan plagiasi atau meniru hasil skripsi orang lain.

Apabila terdapat dengan secara sengaja melakukan kegiatan plagiasi atau meniru hasil skripsi orang lain, maka saya dengan senang hati bersedia dituntut sesuai dengan prosedur dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan keaslian hasil karya ilmiah atau skripsi ini dibuat dengan sesungguhnya dan dibuat dengan keadaan sadar serta tidak ada paksaan dari pihak manapun dan siapapun.

Koto Tuo, 10 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan




LARA MARDIANA ROSA
NPM. 210411004

MOTTO

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah: 6)

"Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras dan pengorbanan."

"Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih baik."

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGATASI KETIMPANGAN SOSIAL DI DESA KOTO TUO KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh :

NAMA: LARA MARDIANA ROSA

NPM: 210411004

Ketimpangan sosial merupakan suatu kondisi dimana terdapat ketidaksetaraan dalam kehidupan bermasyarakat di berbagai aspek. Kondisi tersebut juga dapat dianalogikan dengan adanya jurang pemisah antara masyarakat kelas sosial ke atas dengan masyarakat kelas sosial ke bawah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kebijakan pemerintah desa dalam mengatasi ketimpangan sosial di Desa Koto Tuo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tahun. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian survey, dengan tingkat eksplanasi deskriptif, dengan menggunakan analisa data kualitatif. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa data menggunakan langkah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu Kebijakan Pemerintah Desa dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial di Desa Koto Tuo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi terlaksana dengan cukup baik dan terarah.

Kata Kunci : Analisis, Kebijakan, Ketimpangan

ABSTRACT

ANALYSIS OF VILLAGE GOVERNMENT POLICIES IN OVERCOMING SOCIAL INEQUALITY IN KOTO TUO VILLAGE, CENTRAL KUANTAN DISTRICT, KUANTAN SINGINGI REGENCY

By:

NAME: LARA MARDIANA ROSA

NPM: 210411004

Social inequality is a condition where there is inequality in community life in various aspects. This condition can also be analogous to the existence of a gap between the upper social class and the lower social class. The purpose of this study is to analyze village government policies in overcoming social inequality in Koto Tuo Village, Central Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. This study uses a survey research type, with a descriptive explanatory level, using qualitative data analysis. This research includes field research. This study uses the Purposive Sampling technique. The data collection techniques in this study are interview, observation, and documentation methods. Data analysis uses data reduction steps, data presentation and conclusions. The result of this study, namely the Village Government's Policy in Overcoming Social Inequality in Koto Tuo Village, Central Kuantan District, Kuantan Singingi Regency, was carried out quite well and in a targeted manner.

Keywords: *Analysis, Policy, Inequality*

DAFTAR ISI

Halaman:

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara.....	7
2.1.2 Teori/Konsep Organisasi	10
2.1.3 Teori/Konsep Kebijakan Publik	14
2.1.4 Teori/Konsep Pembangunan Sosial	16
2.1.5 Teori/Konsep Pemerintah Desa	18
2.1.6 Teori/Konsep Ketimpangan Sosial	20
2.2 Kerangka Pemikiran.....	23
2.3 Defenisi Operasional	24
2.4 Konsep Variabel	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Informan	26
3.3 Sumber Data	27
3.4 Fokus Penelitian	27

3.5 Lokasi Penelitian	28
3.6 Metode Pengumpulan Data	28
3.7 Metode Analisa Data	29
3.8 Jadwal Penelitian	31
BAB VI PENUTUPAN	
6.1 Kesimpulan	32
6.2 Saran	32
DAFTAR PUSTAKA	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketimpangan sosial merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh masyarakat desa di Indonesia. Ketimpangan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, peluang ekonomi, dan infrastruktur dasar. Kondisi ini sering kali diperparah oleh faktor geografis, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pemerintahan desa. Ketimpangan tersebut tidak hanya menghambat pembangunan di desa, tetapi juga memperburuk tingkat kemiskinan dan ketidakadilan sosial.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Aparatur Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa : “pemerintah desa adalah kepala desa atau yang di sebut dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang memadai guna mendorong peningkatan kinerja pemerintahan yang selama ini terkesan masih relatif rendah”.

Kebijakan di distribusikan melalui dengan pelayanan yang menjadi manfaat bagi masyarakat individu maupun kelompok dan ada kebijakan menjadi sebuah larangan bagi masyarakat sebagai mana hal tersebut menjadi bertentangan dengan sebuah undang – undang berlaku telah di tetapkan oleh pejabat pemerintah yang mengarah pada masyarakat individu maupun sosial. Dalam melakukan kebijakan publik yang seharusnya melalui beberapa cara untuk memenuhi sebuah

permasalahan yang sulit maka harus melewati dengan seksama agar mempermudah dalam melaksanakan kebijakn publik.

Ketimpangan sosial merupakan suatu kondisi dimana terdapat ketidaksetaraan dalam kehidupan bermasyarakat diberbagai aspek. Kondisi tersebut juga dapat dianalogikan dengan adanya jurang pemisah antara masyarakat kelas sosial ke atas dengan masyarakat kelas sosial ke bawah. Di dunia yang kian modern ini, kondisi ini juga masih sangat banyak ditemukan di kehidupan sosial kita terutama kita yang tinggal di negara berkembang.

Ketimpangan dalam masyarakat adalah sebuah keadaan yang tidak mungkin terlepas dari kehidupan manusia, karena inti jiwa masyarakat yaitu sifat yang menyimpang, masyarakat senantiasa berubah dalam segala tingkat kompleksit internalnya. Oleh karena itu, ketimpangan sosial dalam kehidupan masyarakat terkadang merupakan perubahan yang sangat besar dan dampaknya cukup luas, serta terkadang hanya perubahan kecil dengan dampak yang sangat terbatas.

Kesenjangan ini sering dihubungkan dengan adanya motif perbedaan yang sangat nyata dan dapat dinilai dari sisi keuangan publik, seperti kekayaan harta benda yang dimiliki individu. Terutama dalam hal ketimpangan di bidang ekonomi.

Perbedaan ketimpangan sosial pada berbagai lapisan masyarakat menyebabkan berbagai karakteristik masyarakat tersebut berbeda dengan masyarakat lainnya, terutama masyarakat pedesaan yang merupakan satu kesatuan hukum. Besarnya cakupan kesenjangan sosial menuntut masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial (kelompok), yaitu pemahaman masyarakat diperlukan untuk berinteraksi dengan masyarakat tersebut.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintahan terdepan memiliki peran strategis dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang dapat merespons persoalan ketimpangan ini. Melalui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa seharusnya mampu mengelola sumber daya lokal dan merumuskan program-program pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Namun, pada kenyataannya, tidak semua kebijakan desa mampu secara efektif menyentuh akar persoalan ketimpangan sosial. Dalam banyak kasus, kebijakan yang diambil cenderung bersifat umum, kurang partisipatif, dan tidak mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan seperti petani kecil, perempuan, dan masyarakat miskin. Kebijakan ini biasanya pemberdayaan masyarakat, pengembangan kapasitas masyarakat, penyediaan fasilitas dan infrastruktur desa, serta perluasan akses terhadap pelayanan publik. Melalui kebijakan yang tepat, pemerintah desa berupaya mengurangi jurang ketimpangan yang ada, memberikan kesempatan yang setara kepada semua warga dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa mampu mengatasi ketimpangan sosial yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perumusan, implementasi, serta dampak dari kebijakan desa dalam mengatasi ketimpangan sosial, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan tata

kelola pemerintahan desa yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Adapun program yang dilakukan pemerintah desa Koto Tuo untuk mengatasi ketimpangan di masyarakat yaitu, dalam pemberdayaan masyarakat dilaksanakan program pelatihan menjahit bagi pemuda pemudi yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Berikutnya program bantuan melahirkan bagi ibu hamil yang hendak melahirkan dan terdesak biaya.

Selanjutnya untuk masyarakat yang kurang mampu diadakan pemberian BLTDD atau Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Kemudian bantuan Pendidikan berupa perlengkapan sekolah seperti tas, sepatu, dan alat tulis lainnya. Dan untuk fasilitas umum pemerintah desa memasang lampu tenaga surya untuk penerangan jalan bagi masyarakat yang rumahnya di dalam gang yang minim penerangan. Adapun anggaran untuk program diatas tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel I.1: Anggaran Program Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial di Desa Koto Tuo Tahun 2023

No	Program Pemerintah Desa	Anggaran	Penerima Manfaat
1.	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	Rp 36.000.000	10 Orang
2.	Kursus Menjahit	Rp 8.000.000	15 Orang
3.	Bantuan Melahirkan	Rp 5.000.000	25 Orang
4.	Bantuan Pendidikan	Rp 36.000.000	40 Orang

Sumber: Desa Koto Tuo, 2024

Berdasarkan tabel diatas, anggaran dana desa yang diperuntukan untuk mengatasi ketimpangan sosial di pemerintahan desa Koto Tuo adalah sekitar Rp 85.000.000. Dimana dalam penyelenggaraan program BLTDD memiliki kisaran anggaran sekitar Rp 36.000.000, BLTDD ini diberikan setiap bulan kepada 10

orang yang dinyatakan berhak untuk menerima bantuan tersebut dengan jumlah Rp 300.000 setiap bulan. Selanjutnya untuk program kursus menjahit, anggaran yang disediakan pemerintah desa adalah sebanyak Rp 8.000.000. Kemudian bantuan melahirkan untuk ibu hamil diberikan anggaran Rp 5.000.00, dimana setiap orangnya yang sudah ditentukan layak menerima bantuan tersebut mendapatkan Rp 200.000. Terakhir adalah bantuan untuk Pendidikan berkisar Rp 36.000.000, berupa perlengkapan sekolah yang diberikan langsung kepada anak-anak sekolah yang kurang mampu mulai dari TK hingga SMA.

Meskipun berbagai program dan kebijakan telah digulirkan oleh pemerintah desa, ketimpangan sosial masih menjadi persoalan yang nyata di masyarakat desa. Ketimpangan ini tercermin dari perbedaan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Misalnya, sebagian warga menikmati bantuan sosial secara rutin, sementara kelompok lain yang juga membutuhkan justru tidak terdata sebagai penerima. Selain itu, akses terhadap sumber daya ekonomi dan kesempatan kerja cenderung didominasi oleh kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kedekatan dengan aparat desa.

Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas kebijakan pemerintah desa dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil. Terdapat pula indikasi bahwa perencanaan dan pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya berbasis pada data dan partisipasi masyarakat, yang akhirnya berkontribusi pada kesenjangan sosial yang semakin melebar.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk membuat proposal penelitian dengan judul : **“Analisis Kebijakan Pemerintah Desa Dalam**

Mengatasi Ketimpangan Sosial di Desa Koto Tuo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.2 Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang di atas, penulis merumuskan satu masalah yaitu : “Bagaimana Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial di Desa Koto Tuo”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial di Desa Koto Tuo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dilakukannya penelitian ini adalah :

- 1.4.1 Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan, khususnya dalam kajian administrasi publik.
- 1.4.2 Secara praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah Desa Koto Tuo.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Administrasi Negara diartikan sebagai mekanisme penyelenggaraan mesin pemerintahan yang juga disebut mekanisme penyelenggaraan mesin pemerintahan yang juga disebut birokrasi. Pusat perhatian administrasi administrasi Negara dalam hal ini adalah mekanisme negara ke dalam (administrasi internal). Administrasi Negara dalam hubungan ini adalah administrasi pemerintahan. Administrasi pemerintahan merupakan implementasi peraturan yang mengatur pemerintahan pada tiap asas pemerintahan.

Menurut Dr. Sondang Siagian (dalam Marwiyah, 2022;1) administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Begitu juga dengan Herbert A. Simon (dalam Pasolong, 2017;3) mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Marwiyah (2022;1) administrasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggara kebijaksanaan untuk mencapai tujuan dan di gunakan dalam kehidupan sehari-hari ataupun didalam dunia luar maupun didalam untuk itu administrasi juga berguna dalam berbagai hal.

Marwiyah (2020;2) administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi

tingkat apa pun dapat dilaksanakan dengan baik. Proses administrasi akan melaksanakan tiga fungsi utama yang berhubungan erat dengan tiga tingkatan umum dalam hierarki formal. Di tingkat atas, yaitu fungsi pengarahan organisasi, terutama berkaitan dengan proses perencanaan jangka panjang dari suatu tujuan yang akan dicapai. Di tingkat menengah, yaitu fungsi manajemen organisasi, terutama berkaitan dengan upaya mempertahankan organisasi sebagai suatu pekerjaan yang terus berlangsung lama, ilmu yang diperlukan oleh staf teknis atau profesional yang terlibat dalam proses produksi (hasil). Di tingkat bawah adalah fungsi pengawasan. Dalam kontak langsung dengan pekerja-pekerja profesional dan teknis, fungsi pengawasan mengarahkan penggunaan sumber-sumber serta menjalin agar kegiatan-kegiatan profesional dan teknis dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Ketiga tingkatan ini saling berkaitan, memiliki derajat saling hubungan secara positif dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda, seperti beragamnya organisasi dari berbagai jenis dan ukuran. Misalnya dalam suatu pabrik atau dalam suatu bagian pelayanan sosial medik, fungsi-fungsi pengarahan, manajemen dan pengawasan dapat tertanam hanya pada satu orang. Walaupun demikian, yang terpenting adalah administrasi didefinisikan sebagai proses umum yang pengarahan, manajemen, dan pengawasan merupakan unsur-unsurnya.

Menurut Dimock dan Dimock (dalam Muhammad, 2019;29) administrasi negara merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai

dari salah satu keluarga hingga Perserikatan Bangsa-bangsa disusun, digerakkan, dan dikemudikan.

Waldo (dalam Muhammad, 2019;29) mendefinisikan administrasi negara sebagai organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, administrasi negara merupakan seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan urusan Negara.

Robbins (dalam Muhammad, 2019;29) mengemukakan bahwa *administration in the universal process of vilocioncy getting activities completed with and through other people* (adminstrasi adalah keseluruhan proses dari aktivitas-aktivitas pencapaian tujuan secara efisien dan melalui orang lain).

Thoha (dalam Muhammad, 2019;29) mengemukakan bahwa ilmu Administrasi Negara diturunkan dari ibu administrasi dan ayah politik. Ciri-ciri administrasi negara menurut Thoha (dalam Muhammad, 2019;32) adalah sebagai berikut.

- a. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara bersifat lebih urgen dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh organisasi-organisasi swasta. Urgensi pelayanan ini karena menyangkut kepentingan semua masyarakat dan jika diserahkan atau ditangani oleh organisasi lainnya, tidak akan jalan.
- b. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara pada umumnya bersifat monopoli atau semimonopoli.
- c. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, administrasi negara dan administratornya relative berdasarkan undang-undang dan

peraturan. Hal ini memberikan warna legalitas dari administrasi negara tersebut.

- d. Administrasi negara dalam memberikan pelayanan tidak dikendalikan oleh harga pasar. Pelayanan oleh administrasi negara ditentukan oleh rasa pengabdian kepada masyarakat umum.
- e. Usaha-usaha yang dilakukan oleh administrasi negara sangat bergantung pada penilaian rakyat yang dilayani.

Yeremias T. Keban (Warsono, dkk, 2019;18) menjelaskan bahwa administrasi negara hakekatnya adalah:

- a. bidang yang terutama berkaitan dengan dunia eksekutif, meskipun juga terkait dunia yudikatif dan legislative
- b. bidang yang berkenaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan public
- c. bidang yang berkaitan dengan berbagai masalah manusiawi dan usaha kerjasama untuk mengerjakan tugas-tugas pemerintah
- d. bidang yang diarahkan menghasilkan public goods dan services
- e. sebagai ilmu dan seni, bidang ini memiliki aspek teoritis dan praktis.

2.1.2 Teori/Konsep Organisasi

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, yang dengan kodratnya tersebut maka ia tidak bisa hidup tanpa bantuan sesamanya. Kebutuhan bermasyarakat dari manusia adalah suatu naluri yang diwariskan secara biologis. Maka manusia melakukan kerjasama, dan bergabung dalam kelompok-kelompok yang dapat memperjuangkan dan memenuhi kebutuhannya. Chris

Argyris (dalam Aromatica, D&A, 2021;5) menyatakan bahwa organisasi-organisasi biasanya dibentuk orang guna mencapai sasaran-sasaran yang dapat dicapai terbaik secara kolektif.

Organisasi merupakan wadah atau tempat terselenggaranya administrasi yang didalamnya ada pembagian tugas, ada komunikasi antar satu anggota dengan yang lain, dan sesuatu yang tidak dihilangkan adalah adanya tujuan yang ingin dicapai. Gibson, Ivancevich dan Donnelly (dalam Nawawi, 2019;74) mendefinisikan bahwa organisasi adalah suatu unit terkoordinasi terdiri dari setidaknya dua orang dan berfungsi untuk mencapai suatu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran tertentu.

D. Mooney (dalam Nawawi, 2019;75) mendefinisikan organisasi sebagai bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kemudian John D. Millet menjelaskan organisasi sebagai kerangka struktur dimana pekerja dari beberapa diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.

Stephen P. Robbins (dalam Jaelani, 2021;11) organisasi adalah kesatuan atau *entity* sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama atau kelompok tujuan.

P. Siagian (dalam Jaelani, 2021;12) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang saling bekerja sama serta terkait secara formal dalam rangka melakukan pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan dalam ikatan yang ada pada seseorang atau lebih yang dikenal sebagai atasan dan bawahan.

Max Weber (dalam Jaelani, 2021;11) pengertian organisasi adalah suatu kerangka hubungan terstruktur yang didalamnya terdapat wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja dalam menjalankan suatu tugas tertentu.

Krisnandi, dkk (2019;2) wujud daripada tujuan dicerminkan oleh adanya sasaran. Secara umum tujuan organisasi atau perusahaan adalah menaikkan nilai perusahaan. Ukuran nilai perusahaan adalah dicerminkan oleh meningkatnya harga saham perusahaan tersebut di pasar. Untuk mencapai nilai perusahaan yang meningkat, maka sasaran perusahaan adalah meningkatkan keuntungan, dan mencapai tingkat pertumbuhan.

Sebuah organisasi mempunyai struktur atau batasan yang relatif dapat diidentifikasi, namun sebuah batasan yang nyata harus ada agar kita dapat membedakan antara anggota dan bukan anggota. Stoner Dan Wankell (dalam Widiana, 2020;98) membatasi bahwa struktur organisasi susunan dan hubungan antar bagian komponen dan posisi dalam suatu perkumpulan. Struktur organisasi juga menunjukkan hierarki dan struktur otoritas organisasi serta memperlihatkan hubungan pelaporan nya.

Prof. Dr. Mr Pradjudi Armosudiro (dalam Ummul Mustiqowati, 2021;2) organisasi merupakan kerangka pembagian kerja dan kerangka tata komunikasikerja antara sekumpulan orang yang memegang posisi dan bekerjasama secara tertentu dan bersama-sama guna tercapainya tujuan tertentu.

Menurut perspektif kelembagaan organisasi dapat didefinisikan sebagai satu kesatuan entitas sosial yang dikoodinasikan secara sadar, diikuti pembatasanpembatasan yang secara relatif berkesinabungan dengan

pengidentifikasian rambu-rambunya secara jelas serta senantiasa berupaya meraih pencapaian tujuan atau sekumpulan tujuannya secara bersama-sama. Robbins (dalam Ummul Mustiqowati, 2021;5).

Daft (dalam Ummul Mustiqowati, 2021;5) menjelaskan empat prinsip utamanya, yaitu:

- a. Organisasi merupakan entitas sosial yang terdiri atas manusia dan kelompok manusia. Fungsi penting dari keberadaan organisasi sepenuhnya hanyalah dan tiada lain sebagai wahana interaksi antar manusia;
- b. Organisasi akan senantiasa terarah pada tujuan tertentu, dikarenakan keberadaan tujuan itulah merupakan perwujudan dari alasan berdirinya suatu organisasi. Tanpa formulasi tujuan berarti tak akan ada alasan bagi berdirinya organisasi. Tanpa adanya tujuan yang jelas, hal ini berarti organisasi tidak lagi memiliki alasan bagi kehadirannya atau keberadaannya tertentu;
- c. Organisasi mengandung sistem-sistem yang di koordinasikan secara rasional agar mampu meraih tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tugas-tugas keorganisasian secara objektif dipilah kedalam 6 berbagai departemen agar tercapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang semakin tinggi;
- d. Organisasi memiliki rambu-rambu pembatas yang relatif teridentifikasi secara jelas, yang menentukan unsur mana saja yang termasuk bagian atau bukan bagian dari organisasi.

2.1.3 Teori/Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yang keberadaannya mengikat orang banyak. Kebijakan publik harus dibuat oleh pemegang mandat yang telah diberikan oleh publik atau orang banyak karena memiliki perwakilan atas banyak orang. Kebijakan publik dibentuk oleh lembaga-lebaga pemerintah yang ditujukan sebagai pedoman untuk melakukan berbagai kegiatan maupun tindakan atau hal yang lain dimana masih bersangkutan dengan publik atau warga negara. Sifat dari pelaksanaan kebijakan publik bisa memberikan implikasi yang luas. Jadi, untuk melaksanakan kebijakan publik bukan merupakan hal yang mudah dan sederhana.

Kebijakan publik bisa diartikan sebagai suatu hukum, ketika terdapat suatu isu yang menghambat dan mempengaruhi dalam kepentingan milik publik yang perlu diatur. Namun, bila kebijakan publik menjadi dasar hukum, maka harus ada berbagai pihak yang menyepakati untuk disusun dan ditetapkan.

Thomas R. Dye (dalam Ayuningtyas 2014: 8) mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*)”. William Dunn (dalam Ayuningtyas 2014:16) mengemukakan sistem dan komponen kebijakan public sebagai berikut:

a. Isi kebijakan (policy content)

Terdiri dari sejumlah daftar pilihan keputusan tentang urusan publik (termasuk keputusan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa) yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Isi sebuah kebijakan merespons berbagai masalah

publik (public issues) yang mencakup berbagai bidang kehidupan mulai dari pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lain-lain.

b. Aktor atau pemangku kepentingan kebijakan (policy stakeholder)

Pemangku kepentingan kebijakan atau aktor kebijakan adalah individu atau kelompok yang berkaitan langsung dengan sebuah kebijakan yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan atau kebijakan tersebut. Aktor kebijakan tersebut bisa terdiri dari sekelompok warga, organisasi buruh, pedagang kaki lima, komunitas wartawan, partai politik, lembaga pemerintahan, dan sebagainya.

c. Lingkungan kebijakan (policy environment)

Lingkungan kebijakan merupakan latar khusus di mana sebuah kebijakan terjadi, yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh aktor kebijakan serta kebijakan publik itu sendiri.

Menurut Pasolong (dalam Igrisa, 2022;31) kebijakan merupakan suatu hasil analisis mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan alternatif terbaik.

Menurut Abdul Wahab (dalam Marwiyah, 2022;12), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Sedangkan Anggara (dalam Kusuma, 2022;2) mengartikan kebijakan publik sebagai suatu rangkaian keputusan yang saling memiliki hubungan yang diterbitkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Keberadaan kebijakan publik di negara modern memiliki fokus utama yakni pelayanan publik, dimana prioritas dari pencapaian negara terhadap pertahanan dan peningkatan kualitas hidup lebih diutamakan dan diunggulkan. Tidak hanya berfokus pada pelayanan publik, namun kebijakan publik harus bisa mengakomodasi berbagai kepentingan dan menyatukan kepentingan yang banyak untuk mencapai prioritas dan urgent dalam menata kepentingan yang lebih umum.

Suatu kebijakan memiliki kaitan dengan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk melanjutkan suatu tindakan yang akan dilakukan. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yang keberadaannya mengikat orang banyak. Kebijakan publik harus dibuat oleh pemegang mandat yang telah diberikan oleh public atau orang banyak karena memiliki perwakilan atas banyak orang.

Anderson (dalam Marwiyah, 2022;12) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok actor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

2.1.4 Teori/Konsep Pembangunan Sosial

Pembangunan pada hakikatnya adalah proses perubahan yang diharapkan menghasilkan perbaikan hidup masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas, maka setiap perubahan tersebut akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah sumber daya manusia.

Siagian (dalam Mulyadi M, dkk, 2015;7) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian dari perubahan yang berencana yang dilaksanakan secara sadar oleh

suatu bangsa, negara dan pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Selanjutnya Tjokroamidjojo mendefinisikan pembangunan sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan kearah suatu keadaan yang dianggap lebih baik demi kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

Berkembangnya konsep pembangunan sosial karena kekecewaan akibat kegagalan pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi, di mana ukuran utamanya adalah peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan per kapita. Pembangunan sosial berupaya menawarkan perspektif makro tentang kesejahteraan sosial yang juga berhubungan dengan berbagai macam strategi yang berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupan untuk semua penduduk, melalui pendekatan yang komperhensif dan dinamis untuk mengangkat kesejahteraan sosial. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan adanya kebijakan pembangunan sosial terkonsentrasi pada apa yang diimplikasikan pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan, dan program-program tunjangan sosial lainnya.

Menurut Midgley (dalam Mulyadi M, dkk, 2015;10) pembangunan sosial adalah suatu proses perubahan sosial yang terencana yang didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh, dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis. Di mana dapat dilihat bahwa pembangunan sosial tidak akan terjadi tanpa adanya pembangunan ekonomi, begitu pula sebaliknya pembangunan ekonomi tidaklah

berarti tanpa diiringi dengan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh. Sementara Edi Suharto mengartikan pembangunan sosial sebagai pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial.

Pertiwi (2017;10) pembangunan dalam dimensi sosial berhubungan dengan pemecahan masalah kependudukan, perbaikan pelayanan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan lain-lain.

Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan pembangunan sosial memiliki fungsi *preventif* (pencegahan), *kuratif* (penyembuhan), dan pengembangan (*developmental*). Kebijakan pembangunan sosial merupakan ketetapan yang didesain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi *preventif*), mengatasi masalah sosial (fungsi *kuratif*), dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (*state obligation*) dalam memenuhi hak-hak warganya. Terkait dengan kondisi saat ini, titik penting pembangunan sosial adalah mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, ketertinggalan, keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindakan kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu dan berkesinambungan. (Mulyadi M, dkk, 2015;10).

2.1.5 Teori/Konsep Pemerintah Desa

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

desa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan.

Undang-Undang yang mengatur tentang desa terbaru adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini diundangkan pada 25 April 2024. Undang-Undang ini mengatur beberapa hal, di antaranya:

1. Masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi 8 tahun dan hanya boleh menjabat selama 2 periode.
2. Kedudukan desa.
3. Penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Asas dan tujuan dalam pengaturan desa.
5. Tugas, hak, kewajiban, persyaratan, dan masa jabatan kepala desa.
6. Keuangan desa.
7. Pembangunan desa.

Widjaja, (2014;3) penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa

bertanggungjawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati.

Otonomi desa menekankan pada hak dan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa mereka sendiri, berdasarkan asal-usul dan nilai-nilai sosial-budaya masyarakat desa setempat. Dalam sistem ini, desa memiliki kemandirian dalam menentukan kebijakan, alokasi anggaran, dan pelaksanaan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Pemerintahan dalam pengertian yang sempit ialah segala aktivitas, tugas, fungsi, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang mengelola dan mengatur jalannya sistem pemerintahan negara untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara aktual. Pemerintah desa kini tidak lagi menangani urusan kewenangan formal tetapi juga urusan kewenangan informal yang terdiri dari adat, agama, adat dan berbagai hak asal usul dan/atau hak konvensional masyarakat.

Pemerintahan desa memiliki peran penting dalam memberdayakan masyarakat melalui program-program yang mendorong kemandirian ekonomi, pendidikan, dan penguatan kapasitas sosial. Teori ini menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai langkah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

2.1.6 Teori/Konsep Ketimpangan Sosial

Ketimpangan sosial diartikan sebagai ketidaksetaraan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya bisa

berupa kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, peluang berusaha dan kerja, dapat berupa kebutuhan sekunder seperti sarana pengembangan usaha, sarana perjuangan hak asasi, sarana saluran politik, dan lain-lain.

Menurut Andrinof A. Chaniago ketimpangan adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek social. Selanjutnya Budi Winarno mendefinisikan ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat. Roichatul Aswidah menambahkan ketimpangan sosial sering dipandang sebagai dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi. Sementara Menurut Jonathan Houghton & Shahidur R. Khandker ketimpangan social adalah bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. (Widiningsih. 2020;4).

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial yaitu:

1. Tingkat Pendidikan

Widiningsih (2020;5) pendidikan merupakan social elevator, yaitu saluran mobilitas sosial vertikal yang efektif, yang merupakan kebutuhan untuk semua orang. Pendidikan merupakan kunci pembangunan, terutama pembangunan sumber daya manusia.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Widiningsih (2020;5) faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama munculnya ketimpangan sosial. Ketimpangan ini timbul karena pembangunan ekonomi yang tidak merata. Munculnya ketimpangan yang dilihat

dari faktor ekonomi terjadi karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya.

3. Tingkat Pengangguran

Widiningsih (2020;6) kurangnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat mengalami ketimpangan atau kesenjangan sosial. Kesenjangan antara masyarakat tenaga kerja dan pengangguran menjadi semakin besar karena lapangan pekerjaan semakin sempit. Apabila upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran tidak dilakukan, maka para pengangguran ini akan merasa terdiskriminasi dan ketimpangan sosial pun semakin sulit diatasi.

Karl Marx dan Max Weber (dalam Setiawan, M. 2017;120) menjelaskan melalui teori stratifikasi sosial, ketimpangan sosial menempatkan individu atau kelompok ke dalam berbagai tingkatan sosial. Dalam konteks ini, ketimpangan terjadi karena pembagian kelas sosial yang menciptakan perbedaan dalam akses ke pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

Karl Marx (dalam Susanto, B. 2020;45) menyatakan bahwa ketimpangan terjadi karena adanya dominasi kelompok tertentu atas kelompok lain. Pemikiran Marx ini mencerminkan analisisnya terhadap hubungan kekuasaan dalam masyarakat, khususnya antara kelas yang berkuasa (*bourgeoisie*) dan kelas pekerja (*proletariat*). Dalam konteks Indonesia, ketimpangan seringkali didorong oleh kebijakan dan struktur ekonomi yang menguntungkan kelompok tertentu, terutama kelompok elite ekonomi.

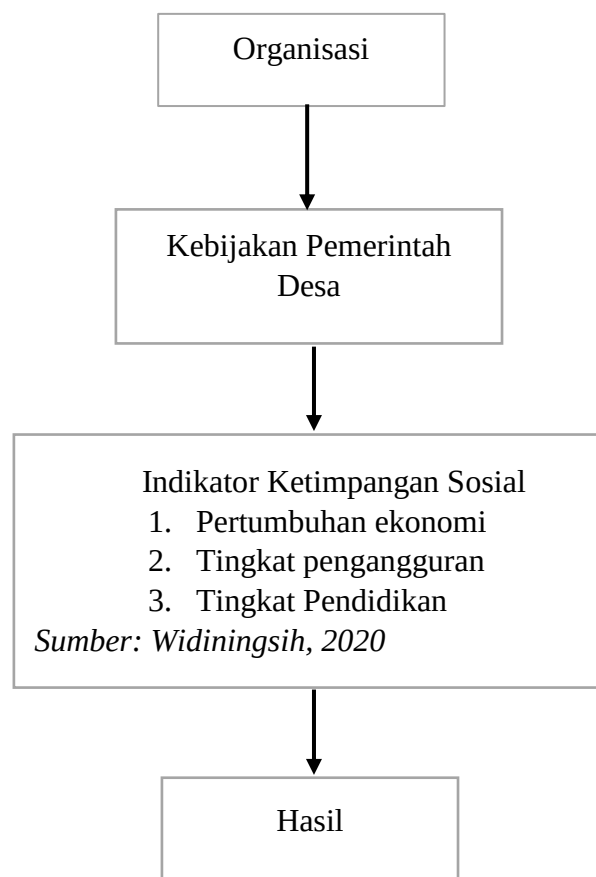
Dalam teori interaksionisme simbolik, ketimpangan sosial tidak hanya ditentukan oleh struktur ekonomi, tetapi juga melalui interaksi dan konstruksi sosial

yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan dilihat sebagai hasil dari cara orang memandang status dan identitas sosial. (Mulyani, T. 2016;51-68).

Teori sosial ekologi menganggap bahwa ketimpangan sosial disebabkan oleh pengaruh lingkungan fisik dan sosial. Di Indonesia, ketimpangan sosial dan ekonomi seringkali diperburuk oleh faktor lingkungan seperti perbedaan akses terhadap sumber daya alam dan fasilitas perkotaan. (Sari, Widiastuti, N. 2019;12-27).

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar II.1: Kerangka Pemikiran Penelitian Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Ketimpang Sosial di Desa Koto Tuo



Sumber: Modifikasi Penulis, 2024

2.3 Defenisi Operasional

- 2.3.1 Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa suatu komunitas dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya diukur melalui indikator makroekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan pendapatan nasional suatu negara atau daerah dalam periode tertentu, baik secara kuantitas maupun kualitas, yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat. (Todaro & Smith, 2020).
- 2.3.2 Pengangguran mengacu pada individu dalam usia kerja (15–64 tahun) yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan siap untuk bekerja dalam periode tertentu, tetapi tidak mendapatkan kesempatan kerja. Tingkat pengangguran adalah persentase dari angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi aktif mencari pekerjaan dalam periode tertentu. (Badan Pusat Statistik, 2022).
- 2.3.3 Tingkat pendidikan merujuk pada capaian pendidikan formal yang berhasil diraih oleh individu, biasanya dinyatakan dalam jenjang pendidikan seperti pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Tingkat pendidikan dapat diukur melalui indikator seperti rata-rata lama sekolah (RLS) dan angka partisipasi kasar (APK). Tingkat pendidikan adalah salah satu indikator sosial yang menunjukkan kemampuan individu untuk mengakses pendidikan formal, serta menjadi determinan penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. (UNESCO, 2021).

2.4 Konsep Variabel

Tabel 2.2: Konsep Variabel Tentang Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial di Desa Koto Tuo

No	Judul	Indikator	Sub-Indikator	Item Penelitian
1	Analisis Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial	1. Pertumbuhan ekonomi	1. Kapasitas manusia 2. Pendapatan per kapita 3. Kesejahteraan penduduk	1. Ordinal
		2. Tingkat pengangguran	1. Inflasi 2. Keterbatasan keterampilan 3. Lapangan pekerjaan	1. Ordinal
		3. Tingkat pendidikan	1. Jenjang Pendidikan 2. Kompetensi	1. Ordinal

Sumber: Modifikasi penulis, 2024

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian survei dengan tingkat eksplanasi deskriptif, dengan menggunakan analisa data kualitatif.

Menurut Sugiyono (2022;36) survei adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, dan hubungan variabel. Survei dapat dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut.

Metode deskriptif menurut Sugiyono (2018;86) adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih, tanpa menghubungkannya atau membandingkannya dengan variabel lain. Metode ini digunakan untuk menggambarkan fenomena atau karakteristik tertentu sebagaimana adanya, berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, tanpa mencari hubungan sebab-akibat di antara variabel-variabel yang diteliti.

Menurut Taylor dan Bogdan (dalam Suyanto dkk, 2022;166) penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

3.2 Informan

Informan artinya orang yang memberikan informasi atau data. (dalam Afatih, 2014;84).

Tabel III.1: Informan Penelitian Tentang Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial di Desa Koto Tuo

No	Informan	Jumlah	Persentase
1.	Kepala Desa	1	11%
2.	Sekretaris Desa	1	11%
3.	BPD	2	22%
4.	Masyarakat	5	56%
	TOTAL	9	100%

Sumber: Data olahan penulis, 2024

Pemilihan informan dilakukan dengan strategi purposive sampling di mana informan yang dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti dengan tujuan tertentu.

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Arikunto (dalam Ismail, 2019;171). Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

3.3.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang diambil/didapat langsung dari sumber data. Perolehan data secara langsung ini, misalnya melalui survey, wawancara dan observasi. (Alfatih, 2014;35).

3.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data tidak didapat secara langsung dari sumber data. Biasanya diperoleh dengan cara mencata atau memfoto dari hasil laporan, jurnal, arsip dan dokumen lainnya. (Alfatih, 2014;35).

3.4 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial di Desa Koto Tuo Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Koto Tuo Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, dapat melalui wawancara, pengamatan, dokumentasi, triangulasi dan lainnya. (Ismail, 2019;173).

3.6.1 Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*. (Usman dkk, 2017;92).

3.6.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data yang dikumpulkan cenderung merupakan data sekunder. (Usman dkk, 2017;106). Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian.

3.6.3 Teknik Observasi Lapangan

S. Margono (Ismail, 2019;173) observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.

3.6.4 Teknik Triangulasi

Menurut Sugiyono (2015:83) triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada.

3.7 Metode Analisa Data

Menurut Lexy J. Moleong (Ismail, 2019:203) analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data ataupun merangkum informasi bersumber pada hal –hal yang penting untuk dibahas atau diambil satu kesimpulan. Reduksi data bisa dilakukan dengan cara melakukan abstraksi atau merangkum hal yang penting agar tetap berada dalam penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data. (Sahir. SH, 2021;47).

3.7.2 Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tertata yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Tahap ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tertata sehingga adanya penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. (Sahir. SH, 2021;48).

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. (Sahir. SH, 2021;48).

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pemerintah Desa dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial di Desa Koto Tuo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi terlaksana dengan cukup baik dan terarah.

6.2 Saran

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran:

1. Pemerintah desa perlu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga.
2. Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan lokal.
3. Penguatan kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan sinergi dalam pembangunan desa yang inklusif dan berkeadilan.
4. Dengan penerapan kebijakan yang tepat dan berorientasi pada keadilan sosial, diharapkan ketimpangan yang terjadi di desa dapat ditekan secara signifikan, sehingga tercipta masyarakat desa yang lebih sejahtera, inklusif, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alfatih Andy. 2014. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Sosial*. Palembang. Universitas Sriwijaya
- Aromatica, D&A. 2021. *Teori Organisasi*. Jawa Tengah. CV. Amerta Media
- Ayuningtyas, D. (2014). *Dasar-dasar Kebijakan Kesehatan*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- Igirisa. 2022. *Kebijakan Publik Suatu Tinjauan Teoritis Dan Empiris*. Jogjakarta. Tanah Air Beta
- Ismail. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya. Media Sahabat Cendekia
- Jaelani. 2019. *Teori Organisasi*. Semarang. Yayasan Prima Agus Teknik
- Krisnandi, dkk. 2019. *Pengantar Manajemen*. Jakarta Selatan. LPU-UNAS
- Kusuma D. S. 2022. *Buku Ajar Kebijakan Publik; Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Jogjakarta. Samudra Biru
- Marwiyah Siti. 2022. *Buku ajar Kebijakan Publik*. Probolinggo. Universitas Panca Marga
- Marwiyah Siti. 2020. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Probolinggo. Universitas Panca Marga
- Muhammad. 2019. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Sulawesi. Unimal Press
- Mulyani, T. 2016. *Ketimpangan Sosial di Indonesia: Perspektif Interaksionisme Simbolik*. Jurnal Komunikasi Sosial, 4(1), 51-68
- Mulyadi M, dkk. 2015. *Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan*. Jakarta. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
- Nurdin Ismail, Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya. Media Sahabat Cendekia

- Nuraini, dkk. 2019. *Modul ketimpangan sosial sebagai dampak Perubahan sosial ditengah globalisasi*. Lampung. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Nawawi. 2019. *Manajemen Pemerintahan*. Depok. Rajagrafindo Persada
- Pasolong. 2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta
- Pertiwi. 2017. *Implementasi Sustainable Development di Indonesia*. Bandung. Pustaka Ramadhan.
- Sahir, SH. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta. KBM INDONESIA
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metodologi penelitian*. Bandung. Alfabeta.
- Suyanto, dkk. 2022. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta. Kencana
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (12th ed.). New York: Pearson.
- Ummul Mustiqowati. 2021. *Dasar-Dasar Teori Organisasi*. Pekanbaru. Irdev Riau
- Usman, dkk. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta. PT Bumi Aksara
- Warsono, dkk. 2019. *Buku Ajar Teori Administrasi*. Semarang. Universitas Diponegoro
- Widiana. 2020. *Buku Ajar Pengantar Manajemen*. Jawa Tengah. CV. Pena Persada
- Widiningsih. 2020. *Modul Sosiologi Ketimpangan Sosial Sebagai Dampak Perubahan Sosial Ditengah Globalisasi*. Bekasi. Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN
- Widjaja. 2014. *Otonomi Desa Meupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Depok. Rajagrafindo Persada

Jurnal:

Sari, D. 2017. *Otonomi Desa dan Pembangunan Desa Mandiri*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 21(2), 110-125.

Sari, R. P., & Widiastuti, N. 2019. *Ketimpangan Sosial Ekologis di Indonesia: Perspektif Sosial Ekologi*. Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, 10(1), 12-27.

Setiawan, M. 2017. Stratifikasi Sosial dan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Sosiologi Indonesia, 6(2), 120-134.

Susanto, B. 2020. Ketimpangan Sosial Ekonomi dalam Perspektif Teori Konflik di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 15(3), 45-61.

Suwandi, S. 2016. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemerintahan Desa: Sebuah Pendekatan Partisipatif*. Jurnal Pengembangan Masyarakat, 12(3), 82-96.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Aparatur Desa

Lembaga/Organisasi:

Badan Pusat Statistik. (2022). Indikator Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: BPS.

UNESCO. (2021). *Global Education Monitoring Report 2021/22*. Paris: UNESCO.